LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 2021



















KATA PENGANTAR

Sebagai unit kerja pendukung, Biro Hukum dan Kepegawaian berupaya memberikan pelayanan sebaik-baiknya di bidang hukum, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian. Kontrak kerja yang dibuat awal tahun atas layanan Biro Hukum dan Kepegawaian menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja.

Tingkat kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian yang mencapai nilai rata-rata diatas 90% menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan mencerminkan pengakuan atas pelayanan yang telah dilaksanakan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan, Biro Hukum dan Kepegawaian terus melakukan inovasi teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi, antara lain: Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Daily Evaluation System (DES), Aplikasi Tunkin 2020, dan APP 360°.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan, Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Tingkat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan sistem JDIHN (jdihn.go.id), penghargaan dari BKN kategori 5 komitmen pengawasan dan pengendalian.

Semoga dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian yang baik sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan *(good governance)*.

Saya berharap keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020 ini memotivasi seluruh komponen Biro Hukum dan Kepegawaian agar bekerja dengan lebih baik. Transformasi untuk menjadi unit kerja terdepan dalam melaksanakan reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan. Untuk itu seluruh insan Biro Hukum dan Kepegawaian harus mengambil peran dalam menumbuhkan berbagai inovasi yang dapat diimplementasikan untuk menyongsong tantangan ke depan dan bagi perbaikan Biro Hukum dan Kepegawaian.

Jakarta, Januari 2022
Kepala Biro Hukum dan
Kepegawaian,



Noer Isrodin Muchlisin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
IKHTISAR EKSEKUTIF vii
BAB I PENDAHULUAN 1
1. Tugas Pokok dan Fungsi 1
2. Aspek Strategis 2
3. Struktur Organisasi 4
4. Sistematika Penyajian 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA 8
1. Reviu Rencana Strategis 2020-2024 8
Visi 9
Misi 10
Tujuan dan Sasaran 11
2. Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2021 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17
1. Capaian Kinerja 17
2. Pencapaian Kinerja terhadap Reviu Renstra 2020-2024..... 27
3. Akuntabilitas Keuangan 27
BAB IV PENUTUP 32
1. Kesimpulan 32
2. Saran 33
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peran Biro Hukum dan Kepegawaian 3
Gambar 1.2 Struktur Biro Hukum dan Kepegawaian 4
Gambar 1.3 Rincian jumlah pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian berdasarkan unit kerja 5
Gambar 1.4 Rincian pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan 6
Gambar 1.5 Sistematika Penyajian 7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian jumlah pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian berdasarkan jenis jabatan struktural dan fungsional 5
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis dan Target Biro Hukum dan Kepegawaian 13
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2021 15
Tabel 3.1 Sasaran, Realisasi dan Capaian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2021 18
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Output Kegiatan Biro Hukum dan Kepegawaian 20
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran per sasaran kegiatan 28
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran diukur dari indikator kinerja 28

IKHTISAR EKSEKUTIF

Layanan Biro Hukum dan Kepegawaian meliputi 3 (tiga) bidang pelayanan yaitu hukum, organisasi dan tata laksana serta kepegawaian. Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian secara garis besar menggambarkan informasi rencana kerja dan capaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2021. Rencana kerja tahun 2021 dan penetapan kinerja tahun 2021 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 yang telah diimplementasikan dalam rencana aksi kegiatan Biro Hukum dan Kepegawaian serta diintikan dalam Indikator Kinerja.

SASARAN:

1. ***Terwujudnya produk hukum yang berkualitas;***
2. ***Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien;dan***
3. ***Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai;***

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran akan terlihat secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, namun demikian perubahan setiap tahun akan nampak dari pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penetapan sasaran dan indikator kinerja dituangkan sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2020 menunjukkan bahwa Biro Hukum dan Kepegawaian memenuhi sasaran yang ditargetkan. Pencapaian sasaran Biro Hukum dan Kepegawaian diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

1. Sasaran terwujudnya produk hukum yang berkualitas mempunyai 2 (dua) indikator yaitu:
   a) Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan, dengan capaian 80,00%;
   b) Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum, dengan capaian 4.
2. Sasaran Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien mempunyai 3 (tiga) indikator yaitu:
   a) Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur, dengan capaian 2 (*);
   b) Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan, dengan capaian 60%;
   c) Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi, dengan capaian 2 (*);
3. Sasaran Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai mempunyai 2 (dua) indikator yaitu:
   a) Indeks system merit, dengan capaian 91,42%;
   b) Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian, dengan capaian 99,68% (*);

Dalam upaya peningkatan layanan, Biro Hukum dan Kepegawaian terus melakukan inovasi teknologi informasi melalui pengembangan aplikasi, antara lain:

1. Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merupakan media untuk perekaman data dan informasi pegawai dalam mempercepat pemutakhiran data pegawai.
2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang merupakan media publikasi semua produk hukum dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Daily Evaluation System (DES) terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merupakan

aplikasi pelaporan kegiatan harian, mingguan, bulanan atau tahunan pegawai.

3. Aplikasi Tunjangan Kinerja merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu membayarkan tunjangan pegawai berdasarkan kinerja yang dicapai oleh pegawai.
4. Aplikasi e-Prilaku 360° terintegrasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah aplikasi untuk Menilai dan Mengukur Perilaku yang dinilai oleh Atasan, Teman/Peer dan Bawahan (360 Derajat) dengan menggunakan survei tertutup sehingga lebih objektif

Dari sisi penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, pelayanan di lingkungan Biro Hukum dan Kepegawaian dilakukan secara efisien, kondisi ini terlihat dari capaian nilai dengan penggunaan anggaran sebesar 99,86% Penjelasan secara rinci disajikan pada Bab III pada laporan ini.

BAB I
PENDAHULUAN

Biro Hukum dan Kepegawaian yang merupakan unit kerja Eselon II yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai peran sebagai koordinator, penggerak dan pemberdaya/fasilitator dalam penugasan pengelolaan bidang hukum, kelembagaan dan sumber daya manusia. Karenanya kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian yang prima tentu sangat dibutuhkan guna mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

"Terwujudnya pelayanan di bidang hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang prima guna mendukung visi dan misi organisasi"

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, diatur bahwa Biro Hukum dan Kepegawaian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan unit kerja eselon II yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Biro Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi internal.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Biro Hukum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, dan pemberian advokasi hukum;
b. penataan organisasi dan tata laksana;
c. pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi internal;
d. pengelolaan urusan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

2. ASPEK STRATEGIS

Peran strategis yang diemban oleh Biro Hukum dan Kepegawaian dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi organisasi, adalah:

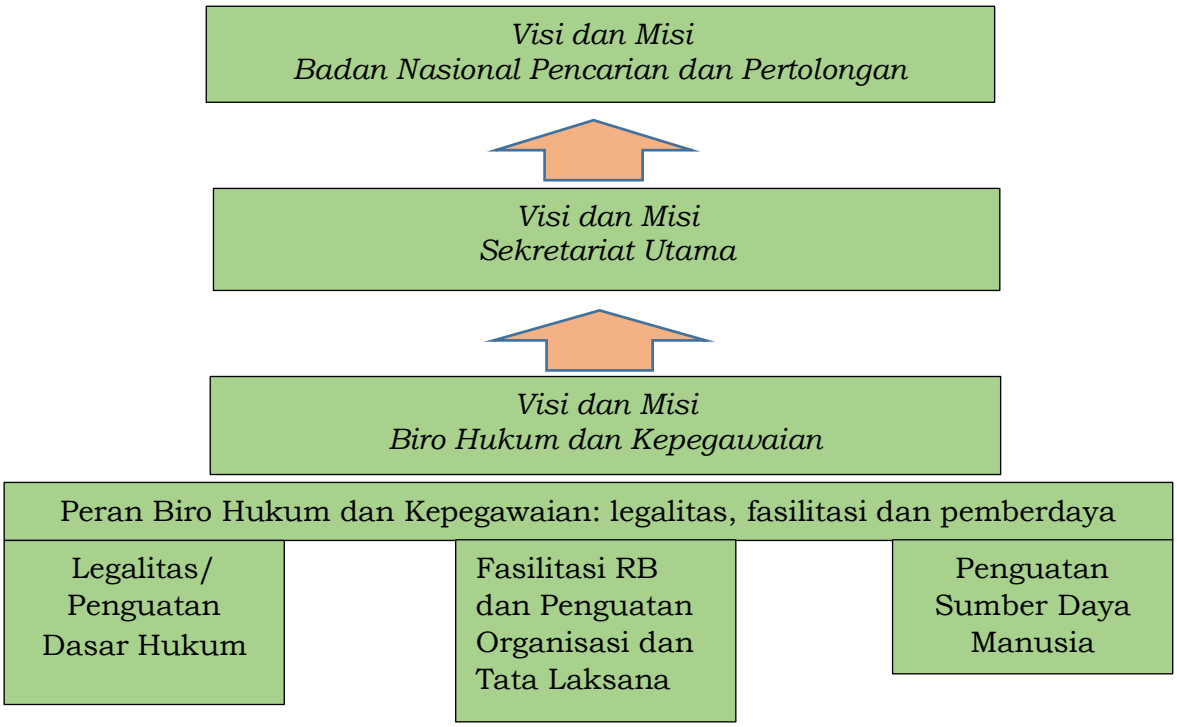
1. Penguatan dasar hukum, sistem pengendalian peraturan perundang-undangan, penguatan advokasi dalam melaksanakan visi dan misi organisasi;
2. Penataan dan penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan baik terhadap dimensi struktur organisasi dan proses organisasi untuk mewujudkan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan indeks reformasi birokrasi.
3. Penataan dan penguatan aspek sumber daya manusia untuk peningkatan kapabilitas menuju sumber daya manusia yang profesional, sinergi dan militan.

Disamping aspek strategis, Biro Hukum dan Kepegawaian juga dituntut untuk memberikan pelayanan optimal/prima kepada unit-unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Layanan prima tersebut bisa dikatakan layanan yang tepat waktu, tepat kualitas, efektif dan berorientasi kepada pengguna.

Peran Biro Hukum dan Kepegawaian dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 1.1

Peran Biro Hukum dan Kepegawaian

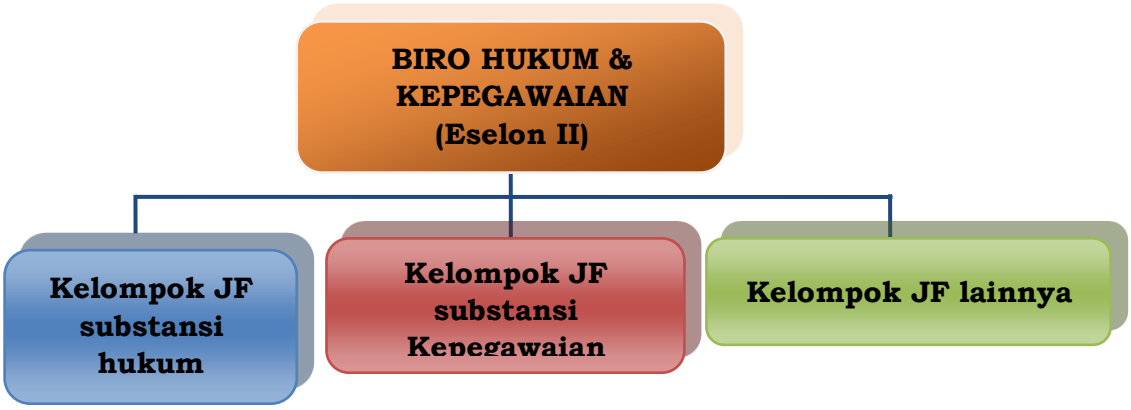


3. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya, Biro Hukum dan Kepegawaian didukung oleh 3 (tiga) kelompok jabatan fungsional, yaitu:

1. Kelompok JF substansi hukum
2. Kelompok JF substansi Kepegawaian
3. Kelompok JF lainnya pendukung tugas pokok

struktur organisasi Biro Hukum dan Kepegawaian tampak pada gambar



Sumber daya manusia di lingkungan Biro Hukum dan Kepegawaian tahun 2019, meliputi:

1. Berdasarkan jenis jabatan struktural dan fungsional

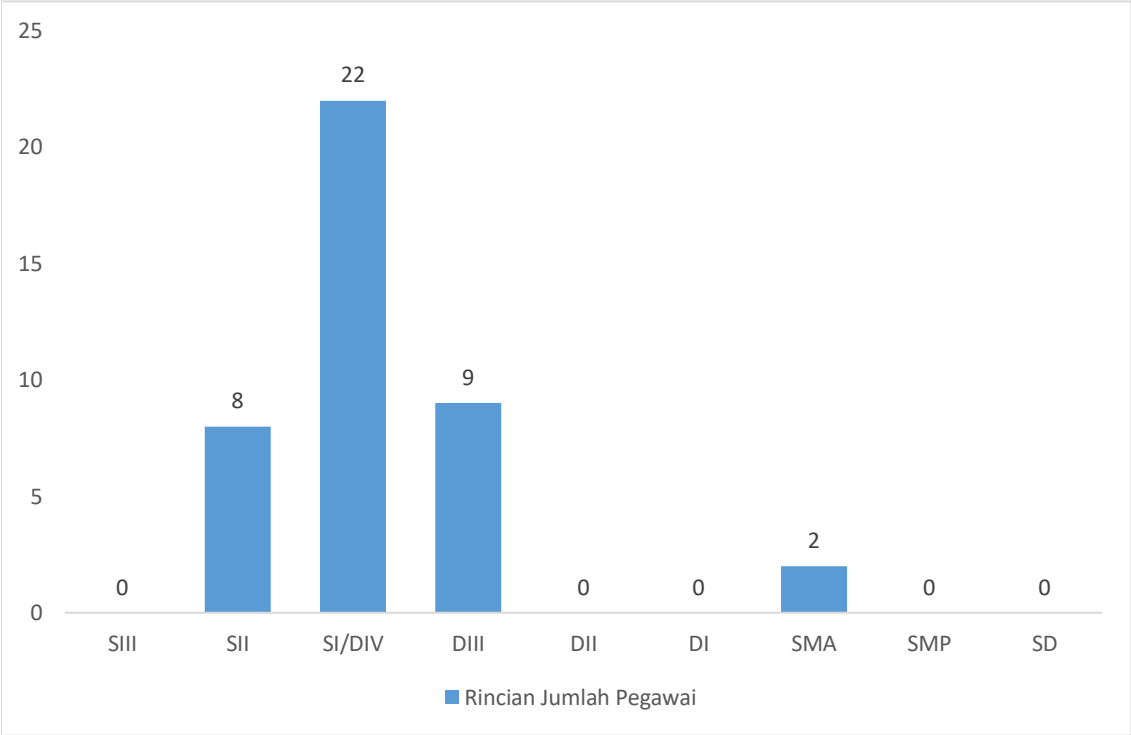
Tabel 3.21 Rincian Jumlah Pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian berdasarkan Jenis Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jumlah
E.II.a	1
JFU	3
JFT Perancang Peraturan	1
JFT Analis Hukum	6
JFT Analis Kepegawaian	22
JFT Arsiparis	7
JFT Assessor SDM	1
Jumlah	41

2. Berdasarkan tingkat pendidikan

Gambar 3.2

Rincian pegawai Biro Hukum dan Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan



4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja disusun untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian selama tahun anggaran 2021. Capaian kinerja dihitung dari perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan target/rencana kinerja tahun 2021 Secara umum, sistematika penyajian laporan kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian dapat dilihat pada gambar berikut:


SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB I
PENDAHULUAN
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sebagai unit eselon II di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Hukum dan Kepegawaian menjabarkan Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 kedalam Renstra Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024. Renstra dimaksud dilengkapi dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja mengacu pada Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.

1. RENSTRA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Biro Hukum dan Kepegawaian merupakan Unit Eselon II dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi hukum, advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi internal.

Mempertimbangkan tugas tersebut, Biro Hukum dan Kepegawaian menjabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja sebagai berikut:

A. VISI BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2020-2024

Visi Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024



Mewujudkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa pencarian dan pertolongan di wilayah NKRI

"Terwujudnya pelayanan di bidang hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang prima guna mendukung visi dan misi organisasi"

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai unit pendukung dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan senantiasa mempersiapkan segala aspek legalitas, penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta penyiapan dan pengembangan sumber daya manusia yang professional, sinergi dan militan"

B. MISI BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 2020-2024

Sedangkan Misi Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024 merupakan penjabaran dari misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024

- *Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan*
- *Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya*

Adapun misi Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan;
2) Menyelenggarakan bantuan hukum dan pelayanan, dokumentasi dan informasi hukum;
3) Menyelenggarakan koordinasi, evaluasi dan monitoring serta peningkatan kinerja kelembagaan;
4) Menyelenggarakan pembinaan koordinasi, evaluasi dan monitoring ketatalaksanaan;dan
5) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang kepegawaian

C. TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN 2020-2024

Dalam rangka mencapai visi dan misi Biro Hukum dan Kepegawaian seperti yang tersebut diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

- *Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan*
- *Peningkatan standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional*

Tujuan Biro Hukum dan Kepegawaian yang merupakan penjabaran dari Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 adalah:



"terwujudnya landasan hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk memaksimalkan dukungan manajemen serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia"

Tujuan tersebut dilengkapi dengan indikator tujuan yang diukur pada akhir tahun Biro Hukum dan Kepegawaian 2020, sebagai berikut:

1) Terwujudnya produk hukum yang berkualitas;
2) Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien;
3) Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai.

Sebagai penjabaran dari tujuan yang telah digariskan, Biro Hukum dan Kepegawaian menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan dari sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

1. *Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan untuk memaksimalkan dukungan manajemen;*
2. *Meningkatnya Kekuatan Landasan Hukum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;*
3. *Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia*



1. *Terwujudnya produk hukum yang berkualitas;*
2. *Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien;*
3. *Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai.*

Sasaran strategis tersebut diatas dilengkapi dengan indikator sasaran strategis yang akan diukur setiap tahun dalam periode rencana strategis 2020 sampai dengan 2024 dengan target tahunan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Target Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK.7 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKSK.7.1 indeks system merit	indeks	-	0,7	0,7	0,8	0,8
	IKSK.7.2 Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian	%	-	80	80	90	90
SK.10 Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	IKSK.10.1 persentase norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan	%	-	80	80	90	90
	IKSK.10.2 persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum	indeks	-	4	4	5	5
SK.12 Terwujudnya organisasi dan tatalaksana yang efektif dan efisien	IKSK.12.1 indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur	indeks	-	3	3	4	4
	IKSK.12.2 Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan	%	-	60	60	65	65
	IKSK.12.3 indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi	indeks	-	3	3	4	4

2. PERJANJIAN KINERJA BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2021

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa setiap instansi diwajibkan untuk menyusun perjanjian kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam perjanjian kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dan sasaran program dilengkapi dengan rumusan indikator dan satuan, serta target kinerjanya.

Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	80%
		Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum	4
2	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	Indeks kesesuain organisasi yang tepat struktur	3
		Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan	60%
		Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi	3
3	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	Indeks system merit	0,7
		Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian	80%

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk setiap masing-masing indikator sasaran strategis dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024. Laporan kinerja tahun 2021 ini merupakan evaluasi kegiatan yang berjalan pada tahun 2020 dan merupakan evaluasi awal dari periode Rencana Strategis 2020-2024. Kinerja tahun 2021 akan dijadikan evaluasi dan masukan untuk pelaksanaan Rencana Strategis 2020-2024.
Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian terhadap target kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian tahun 2020.

Pengukuran capaian sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target indikator yang telah diperjanjikan dengan realisasinya. Analisis dilakukan terhadap semua target indikator agar diketahui seberapa besar kinerja tersebut tercapai. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap kinerja yang belum mencapai target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi tahun berikutnya.
Analisis capaian kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran, Realisasi dan Capaian Kinerja
Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target output	Realisasi output	Capaian 2021 (%)	Target 2021 (%)	Kriteria
1	Terwujudnya produk hukum yang berkualitas	1. Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan	10	8	80,00	80	
		2. Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum	4	4	100,00	100,00	
2	Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	1. Indeks kesesuain organisasi yang tepat struktur	3	2	66,66	66,66	
		2. Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan	60	60	100,00	100,00	
		3. Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi	3	2	66,66	66,66	
3	Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	1. Indeks sistem merit	0,7	0,64	91,42	100	
		2. Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian	80	79,75	99,68	80	

Dari tabel diatas, capaian kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian didapatkan dari keberhasilan output kegiatan yang dilaksanakan oleh ketiga sasaran yang bersinergi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Dari tabel 3.1 diatas, analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa capaian realisasi indikator kinerja pada tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran terwujudnya produk hukum yang berkualitas dengan kriteria:
   a) Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan sebesar 80,00%, target 80% dengan indikator Memuaskan.

      Persentase peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, dihitung dari perbandingan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang diterima. Biro Hukum dan Kepegawaian telah menyelesaikan 8 (delapan) Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari 10 (sepuluh) program peraturan yang ditetapkan.

      Biro Hukum dan Kepegawaian memiliki sistem pengendalian internal terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mensyaratkan adanya surat usulan pemrakarsa, rapat konsinyering, draft rancangan, naskah akademis, naskah kajian.

      Tahun 2021 target terpenuhi dikarenakan Biro Hukum memiliki kriteria yang baru yaitu mensyaratkan adanya harmonisasi internal dari pemrakarsa kepada Para Pimpinan Tinggi. Hal ini diharapkan Peraturan yang dihasilkan benar-benar mempunyai kualitas yang baik.

   b) Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum sebesar indeks 4, target indeks 4 dengan indikator Memuaskan. Persentase kepuasan terhadap layanan informasi hukum diambil dari kuesioner website jdih.basarnas.go.id.
2. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien dengan kriteria:
   a) Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur sebesar 2, dengan kesimpulan telah ditetapkannya Road Map RB Basarnas 2020-2024 yang mencakup *Quick Wins* (Perban 1 Tahun 2021) dan telah dilakukan survei efektifitas organisasi Kantor Pusat serta telah melakukan proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan

ketentuan Kementerian PAN dan RB. Persentase bahan penataan organisasi dihitung dengan membandingkan jumlah penataan organisasi yang disetujui oleh KemenPANRB terhadap usulan penataan organisasi yang diajukan. Pada tahun 2020, Biro Hukum dan Kepegawaian menerima surat persetujuan dari KemenPANRB terhadap usulan untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pembentukan Unit Kerja Pengelola Barang dan Jasa di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

b) Persentase peta proses bisnis dengan SOP yang disahkan sebesar 100%, target 60% dengan indikator Memuaskan. Persentase dokumen ketatalaksanaan yang dihasilkan dengan membandingkan jumlah dokumen tatalaksana yang disetujui oleh KemenPANRB terhadap dokumen tatalaksana yang diajukan.

Pada tahun 2021, Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Instansi Pembina serta Penetapan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mendapatkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Dari 21 (dua puluh satu) Jabatan Fungsional yang terdapat di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 11 (sebelas) Jabatan Fungsional yang telah mendapat Rekomendasi Kebutuhan dari Instansi Pembina.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga telah mendapatkan rekomendasi penetapan formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari 21 (dua puluh satu) Jabatan Fungsional yang terdapat di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 10 (sepuluh) Jabatan Fungsional yang telah mendapat Rekomendasi Penetapan Formasi dari Kemenpan RB

Telah dilakukan evaluasi SOP sebanyak 108 SOP yang menjadi rancangan peraturan SOP tahun 2021, Saat ini telah disusun Rancangan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan telah dibahas dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan

c) Indeks kepuasan layanan fasilitasi reformasi birokrasi sebesar 2, target nila1 PMPRB 77 dengan indikator Tidak dapat disimpulkan (0). Nilai hasil PMPRB diperoleh berdasarkan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan 5 (lima) komponen penilaian, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Nilai PMPRB tahun 2021 masih dalam proses oleh Inspektorat (APIP). Telah dilaksakan sosialisasi strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kedepan dengan mengundang narasumber Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III yang diikuti oleh pejabat Pimti Madya, Pratama, coordinator dan anggota kelompok kerja, kepala UPT dan seluruh pegawai unit pelaksana teknis

3. Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai dengan kriteria:
   a) Indeks system merit sebesar 0,64%, target 0,7% dengan indikator Baik. Persentase pemenuhan sesuai rencana kebutuhan pegawai dihitung dengan membandingkan jumlah formasi CPNS yang disetujui oleh KemenPANRB terhadap jumlah usulan yang diajukan. Pada tahun 2021, Biro Hukum dan Kepegawaian mengajukan alokasi formasi CPNS sebanyak 4774 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) dan disetujui sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh). Formasi CPNS tahun 2021 terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu

b) Persentase kepuasan terhadap layanan kepegawaian sebesar 79,75%, target 80% dengan indikator Tidak dapat disimpulkan. Persentase pemenuhan pengadaan pegawai sesuai formasi dihitung dari membandingkan jumlah formasi CPNS yang diterima terhadap jumlah usulan formasi yang telah disetujui oleh KemenPANRB. Tahun 2021, Biro Hukum dan Kepegawaian mendapatkan formasi sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dengan jumlah CPNS diterima sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan)

2. PENCAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2020-2024

Pencapaian realisasi masing-masing indikator kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian pada awal periode Renstra 2020-2024 merupakan bahan awal sebagai referensi dalam penentuan realisasi untuk tahun selanjutnya.

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa semua indikator kegiatan dapat mencapai target dibandingkan dengan target anggaran, akan tetapi kekurangan target hanya pada indikator pelaksanaan PMPRB, belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan usulan yang diajukan masih dalam proses analisa di KemenPANRB.

Untuk lebih meningkatkan lagi efisiensi anggaran dengan capaian kinerja, Biro Hukum dan Kepegawaian akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun *Plan Of Action (PoA)* pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
2. Melakukan monitoring berkala secara tepat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai perjanjian kinerja.
3. Menyusun perencanaan dan penganggaran dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran berbasis *output* dan *outcame.*

BAB V
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Untuk mencapai tujuan strategis Biro Hukum dan Kepegawaian 2020-2024, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran kegiatan. Capaian sasaran strategis pada tahun 2021 antara lain:

1. Sasaran kegiatan pertama, terwujudnya produk hukum yang berkualitas dicapai dengan menyelesaikan 8 (delapan) Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
2. Sasaran kegiatan kedua, Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien dicapai dengan Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur sebesar 2, dengan kesimpulan telah ditetapkannya Road Map RB Basarnas 2020-2024 yang mencakup *Quick Wins* (Perban 1 Tahun 2021) dan telah dilakukan survei efektifitas organisasi Kantor Pusat serta telah melakukan proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan ketentuan Kementerian PAN dan RB.
3. Sasaran kegiatan ketiga, Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai dicapai dengan pengadaan Calon Pegawai Negeri sebanyak 350 (tiga ratus Sembilan puluh satu) formasi, pengembangan kompetensi pegawai sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) pegawai dengan berbagai macam pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan, dan persentase kepuasan pegawai terhadap layanan kepegawaian yang mencapai 79,75%.
4. Biro Hukum dan Kepegawaian telah memiliki rencana tindakan korektif dan terobosan untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka memperbaiki kinerja unit organisasi. Beberapa tindakan korektif yang diambil diantaranya: Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang merupakan media untuk perekaman data dan informasi

pegawai dalam mempercepat pemutakhiran data pegawai, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang merupakan media publikasi semua produk hukum dan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum yang telah dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

5. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 ini menjelaskan mengenai rencana, target, pembiayaan, upaya, dan hasil pencapaian tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Biro Hukum dan Kepegawaian sebagai pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada *stakeholder.*

2. SARAN

Berdasarkan analisis terhadap capaian kinerja tahun 2021, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas fungsi Biro Hukum dan Kepegawaian, antara lain adalah:

1. Langkah dalam mempertahankan capaian dengan melakukan kaji ulang dan perbaikan secara berkesinambungan terhadap harmonisasi internal penyusunan peraturan perundang-undangan.
2. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian, perlu dilakukan monitoring secara berkala atas PMPRB diseluruh unit kerja.
3. Langkah dalam rangka meningkatkan capaian, perlu dilakukan monitoring secara berkala terhadap pegawai yang telah melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai.
4. Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Biro Hukum dan Kepegawaian Tahun 2021 dapat memenuhi Akuntabilitas kami terhadap pimpinan organisasi dan stakeholder dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN